

Nama : Desmala Az Zahra

NPM : 2313031002

---

---

### **1. Inti isi kedua jurnal**

Jurnal pertama karya Meity Handayani membahas evaluasi penyajian laporan aktiva/aset tetap pada instansi pemerintah. Fokusnya adalah bagaimana laporan aset tetap dapat mendukung pengawasan kelembagaan pemerintah. Temuan utamanya menunjukkan bahwa sistem pelaporan aset tetap pemerintah melalui SIMAK belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemeriksa, terutama karena belum mencantumkan informasi biaya penyusutan dan masih bergantung pada perhitungan DJKN. Hal ini menjadi masalah karena pemerintah diarahkan menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010.

Jurnal kedua karya Budiman, Pangemanan, dan Tangkuman meneliti perlakuan akuntansi aktiva tetap pada PT Hasjrat Multifinance Manado tahun 2012. Temuannya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penentuan harga perolehan aset tetap, tidak dilakukannya pengukuran penurunan nilai aset, serta tidak adanya penghentian atau penghapusan aset tetap meskipun umur ekonomisnya telah habis.

### **2. Pandangan utama**

Menurut saya, kedua jurnal ini sama-sama menunjukkan bahwa persoalan akuntansi aset tetap bukan sekadar masalah pencatatan teknis, tetapi berkaitan langsung dengan akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, pengendalian internal, dan pengambilan keputusan manajemen. Aset tetap biasanya bernilai besar, digunakan jangka panjang, dan menjadi dasar operasional organisasi. Karena itu, kesalahan dalam pencatatan harga perolehan, penyusutan, nilai buku, penurunan nilai, atau penghapusan aset akan membuat laporan keuangan menjadi kurang andal. Pada sektor pemerintah, kelemahan laporan aset tetap dapat berdampak pada rendahnya transparansi penggunaan kekayaan negara. PP No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan SAP sebagai prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, serta menetapkan penerapan SAP berbasis akrual.

Dengan basis akrual, aset, beban, utang, dan ekuitas tidak hanya dicatat saat kas keluar atau masuk, tetapi ketika hak dan kewajiban ekonomi terjadi. Artinya, penyusutan aset tetap wajib

menjadi bagian dari informasi keuangan karena menunjukkan konsumsi manfaat ekonomi aset dari waktu ke waktu.

Pada sektor swasta, seperti kasus PT Hasjrat Multifinance, masalahnya lebih terlihat pada ketidaktepatan pengukuran dan ketidakkonsistenan kebijakan akuntansi. Misalnya, biaya pengiriman mesin fotokopi seharusnya dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan karena biaya tersebut diperlukan agar aset siap digunakan, tetapi dalam kasus jurnal dicatat sebagai biaya operasional. Kesalahan seperti ini akan memengaruhi nilai aset, beban penyusutan, laba rugi, dan posisi keuangan perusahaan.

### **3. Elaborasi berdasarkan teori**

Dari sudut teori keagenan, laporan keuangan berfungsi mengurangi kesenjangan informasi antara pihak yang mengelola aset dan pihak yang berkepentingan. Dalam pemerintah, masyarakat adalah prinsipal, sedangkan pemerintah adalah agen yang mengelola sumber daya publik. Dalam perusahaan, pemilik, kreditur, dan investor membutuhkan laporan yang wajar dari manajemen. Jika aset tetap tidak dicatat secara benar, maka terjadi asimetri informasi: pihak luar tidak mengetahui apakah aset benar-benar ada, masih bermanfaat, sudah rusak, atau sudah seharusnya dihapus.

Dari sudut teori stewardship, pengelola aset dipandang sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjaga dan memanfaatkan aset secara bertanggung jawab. Pada jurnal pertama, lemahnya gudang penyimpanan, aset rusak atau hilang, dan belum lengkapnya informasi penyusutan menunjukkan bahwa fungsi stewardship pemerintah belum optimal. Penulis jurnal pertama juga merekomendasikan peningkatan kualitas pembuat laporan, pelatihan atau diklat, penyediaan gudang ideal, serta format laporan aset tetap yang memuat akumulasi penyusutan dan nilai buku.

Dari sudut teori pengendalian internal, kedua jurnal memperlihatkan bahwa pencatatan aset tetap tidak cukup dilakukan oleh bagian akuntansi saja. Diperlukan prosedur pemeriksaan fisik, rekonsiliasi kartu aset dengan kondisi lapangan, otorisasi pengadaan dan penghapusan, serta sistem informasi yang terintegrasi. COSO menjelaskan bahwa pengendalian internal bukan hanya untuk kepatuhan dan pelaporan eksternal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap data dan informasi organisasi. Dalam konteks ini, rekomendasi jurnal kedua agar dilakukan pemeriksaan daftar aktiva tetap minimal satu tahun sekali sangat relevan.

#### **4. Dukungan hasil riset relevan**

Riset terbaru tentang akuntansi akrual sektor publik Indonesia menunjukkan bahwa transisi ke akuntansi akrual memang penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi manajemen, tetapi implementasinya menghadapi tantangan kepatuhan, kapasitas SDM, dan kebutuhan waktu adaptasi. Studi Ashari tahun 2025 menemukan bahwa lembaga publik membutuhkan waktu adaptasi yang panjang, bahkan setidaknya lima tahun untuk mencapai kepatuhan penuh. Ini mendukung temuan jurnal pertama: masalahnya bukan hanya sistem SIMAK, tetapi juga kesiapan organisasi, kompetensi SDM, dan budaya pencatatan berbasis akrual.

Riset lain tentang penerapan akuntansi berbasis akrual pada barang milik daerah juga menunjukkan bahwa sejak penerapan akrual penuh, penyusutan dan amortisasi wajib dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah. Masalah aset tetap ditemukan pada banyak pemerintah daerah, seperti pencatatan tidak akurat, keberadaan aset tidak jelas, mutasi aset tidak tertib, dan migrasi data sistem yang bermasalah.) Ini memperkuat argumen bahwa isu aset tetap adalah isu struktural dalam tata kelola keuangan publik, bukan kasus administratif biasa. Bahkan BPK pada 2026 masih menekankan pentingnya audit atas aset tetap, khususnya terkait eksistensi, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.) Artinya, topik yang dibahas dalam kedua jurnal masih relevan sampai sekarang.

#### **5. Kritik terhadap kedua jurnal**

Kekuatan kedua jurnal adalah sama-sama menggunakan pendekatan praktis dan langsung pada masalah nyata organisasi. Jurnal pertama kuat karena mengaitkan pelaporan aset tetap dengan kebutuhan pengawasan pemerintah dan standar akuntansi pemerintahan. Jurnal kedua kuat karena memberi contoh konkret kesalahan pencatatan harga perolehan, penurunan nilai, dan penghentian aset. Namun, kelemahannya adalah keduanya masih dominan deskriptif kualitatif. Keduanya belum banyak mengukur secara kuantitatif seberapa besar dampak kesalahan pencatatan aset tetap terhadap rasio keuangan, opini audit, efisiensi penggunaan aset, atau kualitas keputusan manajemen. Karena itu, hasilnya sangat berguna sebagai evaluasi awal, tetapi belum cukup kuat untuk generalisasi luas.

#### **6. Kesimpulan argumentatif**

Menurut saya, pesan penting dari kedua jurnal adalah: aset tetap harus dikelola dengan pendekatan akuntansi, manajemen aset, dan pengendalian internal secara terpadu. Dalam pemerintah, penyajian aset tetap yang lengkap termasuk biaya perolehan, penyusutan, akumulasi penyusutan, nilai buku, mutasi, dan penghapusan akan meningkatkan akuntabilitas publik. Dalam perusahaan, perlakuan akuntansi aset tetap yang sesuai standar akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih wajar dan dapat dipercaya.

Jadi, solusi yang paling tepat bukan hanya memperbaiki format laporan, tetapi juga memperkuat sistem informasi aset, pelatihan SDM, pemeriksaan fisik rutin, rekonsiliasi data, kebijakan kapitalisasi biaya, pengujian penurunan nilai, dan prosedur penghapusan aset. Tanpa itu, laporan aset tetap hanya menjadi dokumen administratif, bukan alat pengawasan dan pengambilan keputusan yang efektif.